

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Penelitian

Pemerintahan Orde Baru muncul sebagai akibat dari krisis politik yang dipicu oleh pembunuhan Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani, beserta lima deputinya dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri. Untung merupakan salah satu komandan batalion dalam pasukan Cakrabirawa, yang berasal dari unsur Angkatan Darat. Pasukan Cakrabirawa sendiri merupakan resimen yang terdiri dari empat unsur dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Resimen ini berada di bawah komando Brigjen Muhammad Sabur dari TNI Angkatan Darat dan resmi dibentuk pada 14 Mei 1962.

Menanggapi peristiwa tersebut, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayjen Soeharto, melakukan serangan balasan dan berhasil menghancurkan kekuatan militer Gerakan 30 September. Soeharto berpendapat bahwa tujuan utama gerakan ini adalah melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan cara menyingkirkan pimpinan Angkatan Darat. Menurutnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang utama di balik kudeta tersebut, mengingat Letkol Untung diketahui memiliki keterkaitan dengan komunisme dalam organisasi Angkatan Darat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat pimpinan Kostrad yang diadakan di Markas Kostrad, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Berdasarkan analisis tersebut, Soeharto kemudian mengambil langkah untuk membubarkan PKI beserta seluruh organisasi yang berafiliasi dengannya pada 12 Maret 1966, setelah menerima surat perintah dari Presiden Soekarno. Surat perintah tersebut dikenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi keamanan di ibu kota serta menjaga keselamatan presiden. Tindakan Soeharto dalam menumpas Gerakan 30 September serta membubarkan PKI mendapat dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat yang antikomunis. Berbagai kelompok aksi pun bermunculan, seperti KAP Gestapu, KAMI, KAPI, KAPPI, dan KASI. Kelompok-kelompok ini aktif melakukan demonstrasi menuntut agar Presiden Soekarno segera membubarkan PKI beserta organisasi yang terkait dengannya. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh Soekarno, yang menyebabkan popularitasnya semakin menurun. Akibatnya, masyarakat mulai beralih

mendukung Soeharto, yang dinilai berani mengambil sikap tegas dan berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno sejak 1 Oktober 1965. Popularitas Soeharto semakin meningkat setelah secara resmi membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.

Pasca peristiwa tersebut, terjadi dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto sejak 1 Oktober 1965. Situasi ini berpotensi membahayakan stabilitas negara dan dikhawatirkan dapat memicu perang saudara. Untuk menghindari hal tersebut, pada 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menerbitkan Surat Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden serta menonaktifkan Soekarno dari jabatannya. Setahun kemudian, MPRS menggelar sidang istimewa yang menghasilkan keputusan penting, yaitu memberhentikan Soekarno dari jabatannya secara resmi. Sejak saat itu, Soeharto diangkat sebagai presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secepatnya. Keputusan ini secara resmi mengakhiri dualisme kepemimpinan dan tercantum dalam TAP MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 (Syukur et al., 2011).

Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto memiliki beberapa karakteristik, yaitu kuat, dominan, militeris, dan represif dengan dipimpin serta didukung oleh kekuatan militer yang bekerjasama dengan teknokrat dan birokrat (Hikam, 1999), serta aparat politik-ideologis untuk melerestarkan dan memproduksi kekuatannya. Karakteristik pemerintahan Orde Baru itulah yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sangat lemah dan tumpul sampai tidak mampu mengartikulasikan diri ke dalam kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keamanan yang dapat membuatnya terlibat lebih jauh di dalam pemerintah. Hal tersebut membuat masyarakat seakan diputus dalam berbagai aktivitasnya, sehingga pemikiran-pemikiran masyarakat kurang berkembang, khususnya masyarakat yang memiliki perbedaan dalam ideologi atau paham pemerintah (As'ad Muzammil, 2016). Jika disimpulkan, maka hubungan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan yang bersifat konspiratif, kooptatif, dan dominatif (Anwar, 1995), bukan hubungan yang harmonis dalam arti yang sebenarnya.

Kuntowijoyo (dalam Eriyanto, 2000), menyatakan bahwa Soeharto adalah tipe manusia yang mendasarkan diri pada *an act of faith* (perbuatan berdasarkan keyakinan), bukan *an act of reason* (perbuatan berdasarkan akal). Oleh karena itu, Soeharto tidak pernah ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Contohnya, Soeharto tidak perlu pertimbangan rasional tetapi hanya bertumpu pada keyakinannya sendiri, ia membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, dalam biografi yang disusun

O.G. Roeder, ditunjukkan betapa yakin Soeharto ketika mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat. Bahkan sepertinya dengan keyakinan yang sama pula Soeharto memutuskan untuk melancarkan operasi “petrus” alias penembakan misterius untuk menekan angka kriminalitas karena banyak terjadi berbagai kasus kejahatan pada saat itu (TEMPO, 2008). Sikap keras Soeharto yang seperti itulah yang akhirnya membuat hubungan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat pada masa Orde Baru menimbulkan banyak konflik dan korban di Indonesia, seperti Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Papua, dan sejumlah tempat lain.

Dari berbagai wilayah yang menjadi titik konflik di masa Orde Baru, saya memutuskan untuk meneliti dan menguraikan lebih mendalam tentang daerah Tanjung Priok. Pemilihan ini didasarkan pada faktor kedekatan geografis, mengingat lokasi konflik tersebut tidak jauh dari tempat tinggal saya saat ini, sehingga saya memiliki akses yang lebih mudah untuk menggali informasi dan melakukan observasi langsung. Selain itu, konflik di Tanjung Priok memiliki latar belakang yang kompleks dan tidak hanya terbatas pada fenomena penembakan misterius atau petrus yang kerap menjadi isu pada masa tersebut. Salah satu peristiwa besar yang menonjol adalah apa yang dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Priok, sebuah insiden berdarah yang mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya umat Islam. Dengan latar belakang historis yang kuat dan dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan politik dan sosial, Peristiwa Tanjung Priok menawarkan banyak aspek penting yang patut dikaji lebih lanjut.

Peristiwa Tanjung Priok terjadi di Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984 merupakan salah satu lembaran hitam dalam sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru. Banyak sekali pemicu-pemicu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah tersebut, yang melibatkan dua pihak yang sering bersebrangan, yaitu antara pihak militer dengan umat Islam. Hal ini cukup penting dan menarik untuk dikaji mengingat bentrokan fisik antara kedua pihak tersebut memunculkan berbagai polemik. Bahkan terdapat beberapa versi dari beberapa sumber yang menjelaskan kronologi terjadinya Peristiwa Tanjung Priok.

Namun, jika dilihat dari konteks politik nasional pada masa itu, yakni Peristiwa Tanjung Priok merupakan hasil dari sebuah reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan umat Islam pada saat itu, dimana Orde Baru ingin menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi berbagai organisasi massa (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol) yang akhirnya memunculkan reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat.

Salah satunya adalah komunitas muslim Priok. Bentuk-bentuk resistensi dan kritik komunitas muslim Priok terhadap konsep asas tunggal Pancasila tersebar melalui pamflet dan ceramah dalam pengajian-pengajian, baik yang berskala kecil maupun besar, seperti tabligh akbar (Akmaliah, 2014).

Bukan hanya dari faktor politik saja, permasalahan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya peristiwa ini, salah satunya penguasaan ekonomi yang pada saat itu banyak dikuasai oleh sekelompok orang saja (Ajoeb, 2002). Dalam buku seri Tempo yang berjudul *Benny Moerdani: yang Belum Terungkap* (2014:97), Benny Moerdani yang menjabat sebagai Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada saat Peristiwa Tanjung Priok terjadi mengungkapkan bahwa permasalahan ekonomi adalah salah satu faktor utama penyebab kerusuhan Tanjung Priok. Selain itu, Nono, ajudan Benny Moerdani, memberi kesaksian bahwa aksi pemicu dari peristiwa itu adalah ekonomi, “Benny Moerdani saat itu lantas ke terminal kontainer barang di Tanah Merah. Sambil mengetuk-ngetuk kontainer, dia berkata, “inilah sebab musabab masalah itu.”. Menurut Benny Moerdani, warga beringas karena pemerintah main gusur demi membangun dermaga pelabuhan kontainer”. Jadi, kondisi ekonomi pada waktu itu juga menjadi salah satu penyebab (Arifin, 2019).

Tanjung Priok merupakan suatu kawasan yang berada pada tahap awal modernisasi di Jakarta. Di kawasan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan utama di Indonesia. Sebagian besar impor melalui pelabuhan ini. Dalam rangka peningkatan ekspor Indonesia, sejak tahun 1982, pelabuhan Tanjung Priok ditunjuk sebagai pelabuhan utama untuk pengapalan komoditi ekspor bersama 3 pelabuhan lainnya, yaitu Tanjung Perak – Surabaya, Belawan – Medan, dan Ujung Pandang – Makassar.

Awal mula dari Pelabuhan Tanjung Priok ada karena saat itu di Teluk Jakarta hanya ada Pelabuhan Pasar Ikan yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada Abad ke-19, saat Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda, orang-orang Belanda ramai membicarakan mengenai Pelabuhan Pasar Ikan yang semakin padat disinggahi oleh kapal-kapal niaga dan perahu rakyat, serta sudah tidak mungkin dikembangkan lagi pada saat itu. Akhirnya, pada bulan Juni 1871, Ratu Kerajaan Belanda menugaskan Pangerannya, Hendrik, pergi ke Indonesia dengan membawa surat Ratu yang berisi perintah untuk membangun pelabuhan baru sebagai pengganti Pelabuhan Pasar Ikan di Tanjung Priok yang bertempat 9 kilometer ke arah Timur Pasar Ikan. Berdasarkan

petunjuk Ratu itulah pada bulan Mei 1877 dibangun pelabuhan Tanjung Priok dengan 1 dermaga yang kini dikenal sebagai pelabuhan I (Lain, 1984).

Hal itu membuat para pendatang dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa yang memiliki harapan tinggi untuk tinggal dan mencari nafkah di ibukota berakhir menjadi buruh pelabuhan, pekerja pabrik, dan bangunan yang bekerja atas dasar upah harian (Suwirta, 2017). Kehidupan yang keras di pelabuhan Jakarta Utara atau Tanjung Priok juga banyak memunculkan berbagai permasalahan sosial, antara lain perjudian, perdagangan minuman keras, pelacuran, pengangguran, dan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh John Bresnan (1993) dan pengkaji lainnya, seperti Rinto Tri Hasworo (2005) dan J. Fabian Junge (2008), bahwa kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 1980-an itu menambah kisruhnya suasana di Tanjung Priok (Suwirta, 2017).

Penelitian mengenai Peristiwa Tanjung Priok sudah ada, diantaranya penelitian Eep Saefulloh Fatah, Andi Suwirta, dan Saepudin. Penelitian tersebut antara lain; Pertama, buku karya Eep Saefulloh Fatah yang berjudul *“Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok”* yang diterbitkan pada tahun 2010 yang membahas dari sudut pandang Pemilu tahun 1982. Kedua, artikel jurnal yang dilakukan oleh Andi Suwirta seorang dosen senior di Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul *“Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta”* yang di-publish pada Agustus 2017 di INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia. Jurnal tersebut membahas Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dalam pemberitaan dan pandangan surat kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. Terakhir penelitian dilakukan oleh Saepudin mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul *“Kelompok Radikal Islam dan Negara pada Masa Orde Baru (Study Kasus Insiden Tanjung Priok 1984)”* tahun 1998 yang membahas mengenai pola konflik Islam dan negara pada masa Orde Baru dengan memilih studi kasus insiden Tanjung Priok 1984.

Berbeda dengan penelitian di atas yang lebih banyak membahas dari segi politik dan media massa. Penelitian saya ini untuk menggali lebih jauh tentang keadaan ekonomi pada saat terjadi Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 di Jakarta Utara. Apalagi di Tanjung Priok terdapat pelabuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat. Menurut saya yang paling menarik di kaji dari penelitian ini adalah apakah adanya Pelabuhan Tanjung Priok menjadi penunjang atau malah menjadi penghambat bagi

pendapatan masyarakat di Jakarta Utara setelah terjadinya Peristiwa Tanjung Priok. Hal ini bisa menjadi suatu kajian historis dalam melihat keadaan ekonomi Orde Baru saat terjadinya Peristiwa Tanjung Priok 1984.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya pembatasan masalah maka ruang lingkup permasalahan yang dikaji menjadi jelas atau tidak melebar kemana-mana. Singkatnya, pembatasan masalah adalah upaya yang harus dilakukan untuk mendekatkan penelitian kepada masalah yang akan diangkat. Dalam pembatasan masalah terdapat penggunaan konsep temporal (waktu) dan spasial (ruang). Batasan temporal ialah terkait dengan waktu yang merupakan suatu hal penting dalam sejarah karena waktu adalah jantung dari narasi sejarah itu sendiri. Batasan spasial merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini batasan temporal (waktu) yang digunakan adalah sejak terjadinya Peristiwa Tanjung Priok yaitu pada tahun 1984 dengan melihat kondisi ekonomi yang terjadi saat itu apakah sebelum, saat, dan setelahnya memiliki dampak. Sampai berakhirnya Peristiwa Tanjung Priok dengan diadakannya pengadilan bagi seluruh warga yang berada di Tanjung Priok yang tertangkap pada tahun 1985 hingga 1990 dengan melihat kondisi ekonomi setelah beberapa lama peristiwa itu terjadi apakah memiliki dampak yang cukup besar atau tidak. Sementara batasan spasial, yaitu di Jakarta Utara terutama daerah kecamatan Koja dan kecamatan Tanjung Priok yang menjadi tempat Peristiwa Tanjung Priok terjadi.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi di Jakarta Utara menjelang Peristiwa Tanjung Priok terjadi?
2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Tanjung Priok saat terjadinya Peristiwa Tanjung Priok?
3. Apa dampak ekonomi dari Peristiwa Tanjung Priok terhadap masyarakat Tanjung Priok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang muncul dalam penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulisan penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi ekonomi di Jakarta Utara menjelang Peristiwa Tanjung Priok terjadi.
2. Mendeskripsikan kondisi ekonomi masyarakat Tanjung Priok saat terjadinya Peristiwa Tanjung Priok.
3. Mendeskripsikan dampak ekonomi dari Peristiwa Tanjung Priok terhadap masyarakat Tanjung Priok.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya dan melengkapi literatur sejarah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan periode pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Melalui kajian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai dinamika ekonomi yang terjadi pada masa tersebut, baik dari segi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan sebagai pelengkap dari berbagai penulisan sejarah yang telah ada, tetapi juga memberikan perspektif baru yang lebih mendalam tentang Peristiwa Tanjung Priok dan bagaimana kebijakan ekonomi Orde Baru membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan salah satu referensi bagi pengajaran sejarah dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya khususnya sejarah ekonomi di Indonesia. Dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan ekonomi dan dampaknya selama masa Orde Baru, terutama dengan melihat pembahasan Peristiwa Tanjung Priok dan keadaan ekonominya. Sehingga penelitian ini tidak hanya berdampak pada pengembangan literatur sejarah, tetapi juga berkontribusi dalam proses akademis yang lebih luas.

D. Kerangka Analisis

Sesuai dengan judul di atas yaitu: “Kondisi Perekonomian Jakarta Utara Sebelum dan Pasca Peristiwa Tanjung Priok (1984-1990)” Penulisan ini mencoba menggunakan Teori Konflik Sosial untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Teori ketimpangan sosial. Teori ketimpangan sosial menggunakan pendekatan mobilisasi sumber daya yang menyoroti pentingnya dukungan masyarakat serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam fenomena gerakan sosial (McCarthy & Zald, 1977). Ketimpangan sosial adalah sebuah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, kesenjangan, atau perbedaan sumber daya pada masyarakat yang biasa disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pemikiran teori ketimpangan sosial seiring berkembangnya zaman dapat dibagi menjadi dua era, yaitu klasik yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber; dan modern yang dikemukakan oleh Julius H. Boeke dan Raul Prebisch. Dari beberapa teori ketimpangan sosial yang ada, penelitian ini menggunakan teori Karl Marx yang disebut sebagai teori konflik karena isi dari teorinya lebih fokus pada pembahasan ekonomi.

Teori konflik menurut Karl Marx menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata, terutama dalam konteks ekonomi, merupakan sumber utama konflik sosial. Menurut teori ini, dinamika kekuasaan dan konflik akibat distribusi yang tidak merata atas sumber daya dan status sosial membentuk struktur sosial. Masyarakat dipandang sebagai arena penuh persaingan, di mana berbagai kelompok berlomba memperoleh sumber daya, hak istimewa, dan kesempatan yang terbatas, sehingga menciptakan serta mempertahankan ketimpangan sosial. Ketimpangan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari sistem sosial. Kelompok yang memiliki kekuasaan memanfaatkan posisinya untuk mempertahankan dominasi, sedangkan kelompok dengan sumber daya lebih terbatas berusaha meningkatkan akses mereka. Teori konflik menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan dan menekankan perlunya perubahan sosial. Ketimpangan dan ketidakadilan sosial bisa menjadi pemicu terjadinya konflik ketika kelompok-kelompok terpinggirkan berupaya menentang serta mengubah keadaan yang ada. Dengan demikian, faktor-faktor penyebab konflik mencakup struktur sosial, dinamika kekuasaan, perbedaan kelas, serta kesenjangan sosial, yang semuanya turut berperan dalam memunculkan konflik di tengah masyarakat (Raya et al., 2024).

Adapun kerangka teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan Skripsi ini adalah teori konflik sosial. Teori konflik sosial menurut Ralf Dahrendorf seorang

sosiolog Jerman, adalah teori yang membahas mengenai konflik karena adanya sebab dan akibat. Konflik adalah fenomena sosial yang umum terjadi di masyarakat. Konflik sosial terjadi tidak hanya karena kepentingan antar individu atau antar kelompok sosial yang berbeda, tetapi juga karena banyaknya kepentingan yang bertentangan (Burhanudin, 2020). Di dalam penelitian ini konflik yang terjadi yaitu antara pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam di Tanjung Priok yang dimotori oleh pemimpin keagamaan.

Berhubungan dengan apa yang dikaji oleh penulis, terjadinya konflik di tengah masyarakat Tanjung Priok lagi-lagi disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat. Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru salah satunya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Hal tersebut juga ditambah dengan para mubaligh dengan ceramah bernada keras dan respon keras terhadap kebijakan pemerintah tersebut juga disampaikan melalui pamflet-pamflet yang ditempel di dinding Musholla yang berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait asas tunggal Pancasila (KOMNASHAM, 2014).

Umat Islam awalnya menerima gagasan asas tunggal dengan kecurigaan terhadap implikasi politis yang terkandung di dalamnya. Mereka menolak gagasan tersebut karena diyakini akan memperburuk situasi politik bagi umat Islam. Bagian dari kelompok Islam yang kritis menganggap bahwa asas tunggal tidak memiliki landasan mendasar, terutama dalam membawa perubahan bagi kehidupan umat Islam dan memperbaiki struktur politik-kenegaraan secara keseluruhan. Prof. Deliar Noer menyatakan bahwa kebijakan asas tunggal dapat menghasilkan enam dampak negatif, termasuk penolakan terhadap keragaman masyarakat dalam mempraktikkan keyakinan agamanya, menghambat pertukaran ide antara individu dengan keyakinan serupa, menolak keterkaitan antara agama dan politik, mengalihkan fokus dari masalah yang perlu diselesaikan secara terbuka tanpa standar penilaian yang jelas, menyimpan keinginan ke arah sistem partai tunggal, dan menghalangi perkembangan pandangan yang dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila (Fatah, 2010).

Kritik umat Islam terhadap asas tunggal muncul karena negara semakin menjauh dari aspirasi kritis umat Islam, menyebabkan tegangan dalam politik dan akhirnya pecah hanya masalah waktu saja. Selain masalah politik dan ideologis, masalah ekonomi juga berkontribusi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Orde Baru karena adanya ketidakpuasan terhadap struktur sosial dan beban hidup yang mereka hadapi. Selain itu, pemojokan umat Islam, yang mengakibatkan banyak orang Islam yang tidak bersalah

menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh militer Orde Baru karena pertentangan dan manipulasi. Disebabkan oleh peristiwa-peristiwa ini, masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh tindakan ekstrem, yang pada gilirannya menyebabkan masalah ekonomi dan kerusuhan sosial (Informasi & Bintang, 1998). Oleh karena itu, para penceramah agama berperan sebagai saluran untuk mengungkapkan aspirasi mereka terkait situasi yang mereka alami (Saepudin, 1998).

Sebagaimana disebutkan di atas, konflik yang terjadi antara pendukung dan penentang kebijakan utama yang menandai hubungan antara negara dan umat Islam. Hal tersebutlah yang akhirnya memicu kerusuhan yang disertai kekerasan bersenjata di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa Tanjung Priok.

Berdasarkan teori yang dipaparkan, yakni teori konflik sosial yang mengambil teori konflik sosial oleh Karl Marx, penelitian ini membahas mengenai kehidupan di Tanjung Priok terutama dalam kondisi ekonomi yang terjadi disana pada saat sebelum dan pasca terjadinya Peristiwa Tanjung Priok yakni tahun 1984-1990. Selain itu juga, melihat bagaimana Peristiwa Tanjung Priok itu dapat terjadi akibat dari adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Dengan begitu, penelitian ini dapat menuju tujuannya untuk melihat kondisi perekonomian yang terjadi di Jakarta Utara sebelum dan pasca Peristiwa Tanjung Priok (1984-1990).

E. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode historis atau metode sejarah. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara historis rekaman peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1975). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah menurut buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 2013).

1) Pemilihan Topik

Dalam pemilihan topik didasarkan pada tiga hal, yaitu kedekatan emosional, kedekatan intelektual, dan rencana penelitian. Berdasarkan kedekatan emosional terbangun atas dasar geografis yakni peneliti yang tinggal di Jakarta Utara ini memiliki

ketertarikan dengan salah satu peristiwa yang terjadi di Jakarta Utara dengan berfokus kepada keadaan ekonomi pada saat terjadinya peristiwa. Untuk kedekatan intelektual, yakni mengetahui ekonomi dalam sudut pandang sejarah. Hal ini tumbuh setelah saya membaca buku-buku yang berkaitan dengan Peristiwa Tanjung Priok, seperti buku karya Eep Saefulloh Fatah yang berjudul *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. Dan untuk rencana penelitian, peneliti sudah menjelaskan di atas, mengenai permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, pentingnya penelitian, luasan dan batas penelitian, dan teori serta konsep yang dipakai.

2) Pengumpulan Sumber (*Heuristik*)

Pengumpulan sumber atau *heuristik* merupakan tahap mencari dan menemukan sumber sejarah dan apa saja yang terkait dengan sumber tersebut. Penelitian diawali dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa data yang berhubungan dengan tema penulisan. Sumber-sumber penulisan yang terkait dengan permasalahan yang penulis dapatkan adalah sumber-sumber primer dan sekunder dari buku dan media massa yang dilampirkan pada daftar pustaka.

Pengumpulan sumber primer didapatkan dari wawancara di Kelurahan Tanjung Priok dengan narasumber yang hidup pada masa terjadinya Peristiwa Tanjung Priok. Adapun surat kabar sezaman seperti surat kabar Merdeka dan Kompas yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional, serta The Jakarta Post dengan datang ke kantornya yang berada di Jakarta Pusat. Sedangkan untuk sumber sekunder menggunakan buku-buku dan media cetak yang beredar didapatkan dari Perpustakaan Nasional dan internet.

3) Verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber)

Tahap verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang di dapat kemudian dicek kebenarannya melalui perbandingan dengan buku atau sumber-sumber lainnya. Verifikasi ada dua macam, yaitu kritik ekstern (otentisitas atau keaslian sumber) dan kritik intern (kredibilitas atau kebiasaan dipercaya) (Kuntowijoyo, 2013). Menurut Dudung Abdurrahman (1999:58) kritik sumber ini meliputi:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern meliputi apakah data itu otentik, yaitu keakuratan sumber, bukan tiruan, turunan, palsu, kesemuanya dilakukan dengan meneliti segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber tersebut adalah sumber dokumen tertulis maka harus diteliti bahan yang dipakai (kertas), tinta, bahasa (ejaan), huruf, tahun terbit, yang

menerbitkan, dan sebagainya. Contohnya, dalam surat kabar Merdeka, menggunakan kertas dengan tulisan yang dicetak menggunakan mesin, sudah menggunakan bahasa atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), huruf yang tertata rapih, terdapat tahun terbit 1984 dan yang menerbitkan yakni surat kabar Merdeka.

b. Kritik Intern

Kritik intern adalah kritik yang berkaitan dengan isi pernyataan yang disampaikan oleh sejarah. Kritik intern menilai kesahihan data dalam sumber (kredibilitas). Kredibilitas berarti mencari asal muasal sumber berasal karena kesaksian sumber dalam sejarah adalah faktor terpenting dalam menentukan sah atau tidaknya bukti atau fakta. Contohnya, wawancara dengan narasumber yang hidup pada masa terjadinya Peristiwa Tanjung Priok. Beliau melihat dan merasakan suasana yang terjadi pada saat itu. Hal tersebut dapat menunjukkan bukti bahwa wawancara tersebut dapat dipercaya dengan melihat Peristiwa Tanjung Priok (1984-1985) dari sudut pandang masyarakat yang mengalaminya pada saat itu.

4) Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan langkah pemberian makna pada fakta sejarah berdasarkan pada penalaran peneliti yang ditunjang oleh sumber-sumber sejarah yang diperoleh, untuk menghindari adanya subjektivitas dengan melakukan analisis dan sintesis. Analisis atau berarti dengan melakukan penguraian karena kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan karena kadang dibutuhkan pengelompokkan data jika mempunyai konsep. Dalam interpretasi baik analisis maupun sintesis bisa terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut sah meskipun datanya sama.

5) Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir setelah melakukan beberapa tahapan di atas, maka peneliti melakukan tahap ini yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah yang disajikan peneliti menggunakan analisis naratif. Dalam tahapan ini peneliti sangat mengusahakan agar tulisan yang peneliti tulis logis, jelas dan sistematis.

2. Bahan Sumber

Bahan sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun beberapa sumber primer yang ditemukan berupa surat kabar sezaman dengan terjadinya peristiwa, yaitu seperti surat kabar *Merdeka*, *Kompas* dan *The Jakarta Post*. Selain itu, penelitian ini juga melakukan

wawancara dengan narasumber yang hidup pada masa terjadinya Peristiwa Tanjung Priok.

Sedangkan untuk sumber sekunder, digunakan buku-buku dan media cetak yang beredar. Untuk buku-buku yang digunakan cukup banyak beberapa diantaranya, yaitu buku karya Joebaar Ajoeb yang diterbitkan tahun 2002 berjudul *Islam Diadili: Mengungkap Tragedi Tanjung Priok*, buku karya Eep Saefulloh Fatah yang diterbitkan tahun 2010 berjudul *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*, buku karya dari Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPI) yang diterbitkan pada tahun 1998 berjudul *Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa? (Kumpulan Fakta dan Data)*, buku karya Widjiono Wasis pada tahun 2003 berjudul *Kesaksian Tanjung Priok: Tragedi yang Tidak Perlu*, buku data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1985 berjudul *Jakarta Utara dalam Angka 1985*, buku data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990 berjudul *Jakarta Utara dalam Angka 1990*, dan sebagainya yang dapat dilihat di daftar pustaka.



Intelligentia - Dignitas